E-ISSN: 2798-0413,P-ISSN :2798-0111
The journal is accredited "**Sinta 5**" by Ministry of Research and Technology / National Research and Innovation Agency Republic of Indonesia
Number: 230/E/KPT/2022 on December 30, 2022.

# Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Presiden 2024

**Novika Prameswari Arnostaviana [1], Slamet Muchsin [2], Retno Wulan Sekarsari [3]**

[1] Universitas Islam Malang, Indonesia; novikaprameswari2@gmail.com
[2] Universitas Islam Malang, Indonesia; s_muchsin63@unisma.ac.id
[3] Universitas Islam Malang, Indonesia; sekarsari@unisma.ac.id

**IDAROTUNA: Jurnal Adminstrative Science**

**Vol 7 No 2 November 2026**
https://doi.org/10.54471/idarotuna.v7i2.223

Received: October 01, 2026
Accepted: October 25, 2026
Published: November 05, 2026

**Publisher's Note:** Program Study Office Adminstrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

**Abstract:** The low political literacy, high levels of skepticism, and indifference among first-time voters (Gen Z) at SMA Negeri 2 Batu with regard to the 2024 Presidential Election—occurring in the context of social media misinformation and concerns about money politics—are the driving forces behind this study. The study's objectives are to examine the Batu City General Election Commission's (KPU) initiatives to increase first-time voter turnout, pinpoint variables that encourage and hinder such efforts, and evaluate their efficacy. The research methodology used was descriptive qualitative. In-depth interviews, participant observation, and document analysis were used in the data collection process. Triangulation procedures were employed to ensure the authenticity of the data. According to research, the Batu City General Election Commission (KPU) used a hybrid approach that included in-person "Goes to School" outreach, actual voting simulations, and the release of instructional digital video on TikTok and Instagram. While student disinterest and lack of focus during outreach sessions were the biggest obstacles, collaborative partnerships with schools were a crucial enabler. According to the study's findings, the Batu City KPU's efforts are moderately effective. Although the approach significantly improved students' technical election knowledge by 92% in the cognitive dimension, it has not yet fully addressed the emotive and conative dimensions in terms of encouraging voluntary voting.

**Keywords**: *Political Participation; First-time Voters; General Elections Commission; Gen Z; Effectiveness Evaluation.*

**Pendahuluan**

Legitimasi dan keberlanjutan suatu sistem demokrasi modern sangat bertumpu pada tingkat partisipasi politik masyarakatnya, terutama melalui instrumen pemilihan umum. Pemilihan umum bukan sekadar ritual prosedural lima tahunan, melainkan sebuah menara pancang utama bagi pengejawantahan kedaulatan rakyat sekaligus indikator makro kesehatan iklim politik sebuah negara (Sanit, 2017). Melalui pemilu, masyarakat mendistribusikan mandat kepada para aktor politik untuk merumuskan kebijakan publik yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, keterlibatan aktif setiap elemen warga negara dalam bilik suara menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang responsif serta akuntabel. Secara global, tantangan terbesar penyelenggaraan pemilu masa kini tidak lagi berpusat pada aspek teknis logistik semata, melainkan pada bagaimana menjaga kontinuitas partisipasi elektoral dari generasi ke generasi.

Menurut laporan komprehensif yang dirilis oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA, 2023), tren partisipasi pemilih muda secara global dalam kurun waktu satu dekade terakhir menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun secara linier di berbagai belahan dunia. Rata-rata tingkat kehadiran pemilih berusia di bawah 25 tahun di bilik suara berada pada angka 12% hingga 15% lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok usia di atas 40 tahun. Kesenjangan sosiologis-politik yang melebar ini mengindikasikan adanya disonansi komunikasi yang serius antara institusi penyelenggara pemilu yang rigid dengan karakteristik pemilih muda yang cair, dinamis, dan cenderung berjarak dari politik formal. Di Indonesia, dinamika keterlibatan pemilih muda menjadi determinan yang sangat kritikal dan strategis mengingat negara ini tengah berada pada puncak bonus demografi. Berdasarkan laporan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirilis secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), total pemilih pada Pemilu 2024 mencapai 204.807.222 jiwa, di mana gabungan antara Generasi Y (Milenial) dan Generasi Z menguasai sekitar 60,49% dari total manifestasi suara nasional. Secara lebih spesifik, Generasi Z yang sebagian besar di antaranya merupakan kelompok

pemilih pemula yang baru pertama kali berhak memberikan hak suaranya berkontribusi sebesar 24,94% atau setara dengan 50.645.669 pemilih. Besarnya proporsi demografis ini menempatkan pemilih pemula bukan lagi sebagai objek pelengkap atau komoditas politik musiman, melainkan sebagai aktor strategis utama yang preferensinya menentukan potret kepemimpinan nasional (Muhtadi, 2019).

Meskipun secara kuantitatif porsi pemilih pemula sangat mendominasi struktur data pemilih nasional, realitas sosiologis di tingkat daerah menunjukkan adanya anomali yang rumit. Kota Batu, sebagai salah satu wilayah urban yang tumbuh dinamis di Jawa Timur, tidak luput dari tantangan elektoral ini. Dari total DPT Kota Batu pada Pemilu 2024 sebesar 164.516 pemilih, sebanyak 22% atau 33.850 pemilih berada pada kategori Generasi Z. Salah satu lokus yang paling representatif untuk memotret karakteristik pemilih pemula di wilayah ini adalah SMA Negeri 2 Batu. Siswa kelas XII di sekolah ini berada pada rentang usia 17–18 tahun yang secara yuridis-formal baru pertama kali bersentuhan langsung dengan hak pilih dalam Pilpres 2024. Namun, transisi status dari seorang pelajar menjadi seorang pemilih aktif yang rasional tidak berjalan mulus. Pada tataran empiris, terdapat kesenjangan yang mengkhawatirkan antara besarnya proporsi jumlah pemilih pemula dengan kualitas kesadaran politik mereka. Banyak pemilih pemula memandang pemilu sekadar seremoni elite dan arena perebutan kekuasaan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan kehidupan sekolah maupun masa depan mereka (Gaffar, 2021).

Keadaan bidang penelitian saat ini menunjukkan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi dan efikasi diri, serta faktor eksternal berupa pendidikan dan sosialisasi politik (Verba et al., 1978; Sukmono, 2015). Menurut Teori Modernisasi dan Saluran Partisipasi (Huntington & Nelson, 1976), peningkatan pendidikan dan akselerasi teknologi informasi idealnya mendorong keterlibatan warga negara secara aktif dalam sistem politik. Namun, dalam konteks pemilih muda digital saat ini, terjadi fenomena atau diskursus menyimpang (political gap); penetrasi gawai pintar (smartphone) dan derasnya arus informasi di platform media sosial seperti TikTok dan Instagram justru

memaparkan siswa pada disinformasi, misinformasi, gimmick politik, serta narasi money politics. Paparan materi yang dangkal atau bias ini alih-alih membangun literasi politik yang sehat, justru memicu kebingungan masif, meningkatkan skeptisisme, memperkuat sikap apatis, dan mendorong preferensi untuk bersikap golput di kalangan pemilih pemula (Budiardjo, 2018; Gaffar, 2021).

Di samping hambatan sosiopsikologis, tantangan mekanis-birokrasi juga membayangi partisipasi pemilih pemula. Berdasarkan data administrasi di SMA Negeri 2 Batu, dari 206 siswa yang memenuhi syarat usia 17 tahun pada hari pemungutan suara, masih terdapat selisih siswa yang belum memiliki fisik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Hambatan ini menunjukkan pentingnya koordinasi lintas instansi antara lembaga penyelenggara pemilu (KPU), sekolah, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk memastikan bahwa hak pilih yang telah dijamin undang-undang dapat terfasilitasi secara legal di tempat pemungutan suara (TPS).

Studi ini menjadi sangat penting dan strategis untuk diteliti guna mengevaluasi sejauh mana intervensi lembaga penyelenggara pemilu tingkat daerah mampu mentransformasi pemahaman regulasi menjadi kesadaran partisipasi politik yang nyata dan sukarela pada pemilih pemula. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Umum Presiden 2024, mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi di lapangan, dan mengevaluasi efektivitas hasilnya di SMA Negeri 2 Batu.

Kesimpulan utama dari studi ini menunjukkan bahwa KPU Kota Batu telah menerapkan strategi gabungan (hybrid approach) melalui program sosialisasi tatap muka Goes to School, simulasi fisik pemungutan suara, dan diseminasi konten edukatif digital. Strategi ini sukses besar pada dimensi kognitif dengan meningkatkan pengetahuan prosedural pemilu siswa hingga 92%, tetapi belum optimal menyentuh dimensi afektif dan konatif akibat tingginya sikap apatis, lemahnya keterikatan emosional pada media sosial KPU

(34%), serta kuatnya pengaruh dorongan eksternal keluarga dalam menggerakkan kehadiran fisik ke TPS (71%).

**Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi secara holistik dan mendalam mengenai strategi, tantangan, serta efektivitas upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Lokasi penelitian berfokus pada dua titik utama, yaitu Kantor KPU Kota Batu selaku lembaga penyusun dan pelaksana kebijakan, serta SMA Negeri 2 Batu sebagai instansi pendidikan menengah yang menjadi lokasi percontohan (pilot project) program sosialisasi. Fokus kajian dibatasi pada tiga indikator utama: bentuk strategi komunikasi (sosialisasi tatap muka Goes to School dan kampanye digital), faktor pendukung serta penghambat di lapangan, dan evaluasi efektivitas perilaku politik siswa yang diukur melalui dimensi kognitif, afektif, dan konatif.

Sumber data penelitian mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik purposive sampling terhadap informan kunci yang mewakili tiga simpul utama: jajaran komisioner dan pejabat teknis KPU Kota Batu, guru mata pelajaran PPKn/kurikulum, serta siswa kelas XII yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pemula. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari dokumen resmi rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), regulasi kepemiluan, materi modul, serta analisis konten media sosial resmi KPU Kota Batu di Instagram dan TikTok. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik komplementer, yakni wawancara semiterstruktur, observasi partisipatif pada kegiatan sosialisasi dan simulasi pemungutan suara, serta studi dokumentasi.

Data yang terkumpul dianalisis secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tiga tahapan: reduksi data (data reduction) untuk memilah dan mengelompokkan tema-tema krusial, penyajian data (data display) dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel komparatif, serta penarikan kesimpulan (conclusion drawing) secara

bertahap. Untuk menjamin keabsahan dan keandalan data (trustworthiness), penelitian ini mengandalkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan respons dari KPU, guru, dan siswa; triangulasi teknik dengan mencocokkan hasil wawancara lisan terhadap bukti fisik dokumentasi kegiatan dan konten media sosial; serta uji verifikasi ulang (member check) bersama para informan kunci.

## Diskusi

### 1. Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih Pemula

Partisipasi politik didefinisikan sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan politik dan pemilihan pemegang jabatan publik (Verba et al., 1978; Budiardjo, 2018). Pemilih pemula yang didominasi oleh Generasi Z berusia 17–21 tahun memiliki posisi demografis yang sangat strategis dalam kontestasi demokrasi, namun sering kali diwarnai oleh minimnya pengalaman politik, efikasi politik yang rendah, serta tingkat skeptisisme yang tinggi (Campbell et al., 1960; Wibowo, 2021). Ketimpangan antara besarnya jumlah pemilih muda dengan rendahnya keterikatan politik ini menempatkan pendidikan politik sebagai agenda pelembagaan demokrasi yang sangat krusial.

Merujuk pada Teori Sosial Politik Gabriel Almond, orientasi dan perilaku politik masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama: kognitif, afektif, dan konatif/evaluatif (Almond & Verba, 1963). Dimensi kognitif berkaitan dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan prosedural mengenai sistem pemilu, dimensi afektif mencakup keterikatan emosional dan minat terhadap dinamika politik, sedangkan dimensi konatif bermuara pada keputusan kritis untuk bertindak secara nyata di bilik suara. Ketiga dimensi ini saling memengaruhi dalam membentuk tingkat partisipasi elektoral pemilih pemula yang rasional dan berkelanjutan.

### 2. Modernisasi dan Saluran Partisipasi Politik

Menurut Teori Modernisasi dari Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1976), perkembangan taraf pendidikan, urbanisasi, dan akselerasi teknologi informasi berperan

sebagai katalis utama dalam memperluas saluran partisipasi politik masyarakat. Bagi Generasi Z yang tumbuh sebagai digital native, platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi saluran komunikasi utama dalam menyerap serta mengolah informasi kepemiluan (Prasetyo, 2021; Wiranti, 2024). Kehadiran teknologi digital memangkas sekat-sekat informasi birokrasi yang dulunya dianggap kaku dan sulit diakses oleh pemilih muda.

Namun demikian, modernisasi teknologi yang tidak diimbangi oleh pelembagaan nilai politik yang matang berpotensi menimbulkan political gap (kesenjangan politik). Derasnya arus disinformasi, gimmick politik yang dangkal, serta isu money politics yang beredar luas di media sosial sering kali justru memicu alienasi politik dan memperkuat sikap apatis di kalangan pelajar menengah atas (Gaffar, 2021). Oleh karena itu, saluran partisipasi digital memerlukan pengelolaan pesan yang edukatif, visual, dan adaptif agar mampu mentransformasi pola konsumsi informasi digital menjadi kesadaran politik yang murni.

### 3. Peran Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Teori Kelembagaan Formal (Institutional Theory) menegaskan bahwa institusi publik memegang peranan kunci dalam membentuk norma, aturan main, dan preferensi perilaku warga negara (March & Olsen, 1984). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berkedudukan sebagai lembaga negara independen yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu yang inklusif, transparan, dan berintegritas sekaligus mengemban mandat menyelenggarakan pendidikan pemilih (voter education). Dalam kerangka ini, KPU bertindak sebagai agen sosialisasi politik formal yang memediasi nilai-nilai demokrasi ke dalam masyarakat.

Dalam menjangkau kelompok pemilih pemula, KPU mengintervensi kesadaran politik siswa melalui berbagai bentuk program strategis, seperti sosialisasi tatap muka Goes to School, simulasi fisik pemungutan suara, diseminasi konten media sosial, dan pembentukan Relawan Demokrasi (Surbakti, 2010; Putri, 2022). Keberhasilan intervensi

kelembagaan ini sangat bergantung pada kemampuan KPU dalam menjalin kolaborasi sinergis dengan institusi pendidikan menengah menengah atas guna memastikan pesan-pesan regulatif dapat terinternalisasi secara optimal dalam ekosistem sekolah.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. **Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu mengimplementasikan strategi gabungan (*hybrid approach*) untuk menjangkau kelompok pemilih pemula (Generasi Z) di SMA Negeri 2 Batu. Kombinasi ini menyatukan pendekatan konvensional tatap muka dan pendekatan digital.

**a. Sosialisasi Tatap Muka dan Simulasi Pemungutan Suara (*Goes to School*)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu mengimplementasikan strategi edukasi politik secara langsung dengan menyasar sekolah menengah atas melalui program *Goes to School*, salah satunya di SMA Negeri 2 Batu. Kegiatan ini dirancang untuk menyampaikan materi kepemiluan yang mencakup tahapan pemilu, peran strategis hak suara pemuda, hingga etika berkomunikasi di media sosial selama kontestasi politik berlangsung. Guna menghindari kejenuhan akibat penyampaian materi berbentuk ceramah formal, KPU mengombinasikannya dengan simulasi fisik pemungutan suara menggunakan perlengkapan asli seperti bilik suara, kotak suara, dan surat suara tiruan. Pendekatan berbasis pengalaman (*experiential learning*) ini terbukti efektif dalam menyederhanakan alur birokrasi pemungutan suara yang rumit menjadi aktivitas interaktif, sehingga mampu mendongkrak pemahaman teknis siswa secara instan.

Keberhasilan simulasi fisik ini secara teoretis mengonfirmasi ketercapaian fungsi KPU pada dimensi orientasi kognitif pemilih pemula. Mengacu pada Teori Kelembagaan Formal (*March & Olsen, 1984*), institusi publik penyelenggara pemilu berhasil memanfaatkan kapabilitas strukturalnya untuk mentransfer aturan main (*rules of the game*) dan norma regulatif ke dalam ekosistem pendidikan formal. Temuan ini juga memperkuat studi

terdahulu dari Firmansyah (2024) dan Ilham (2018), yang menegaskan bahwa metode sosialisasi langsung berbalut simulasi di lingkungan sekolah efektif menumbuhkan kepercayaan diri serta memangkas kebingungan teknis pelajar yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS).

**b. Transformasi Digital dan Kampanye Media Sosial**

Menyadari bahwa karakteristik Generasi Z sangat bergantung pada penggunaan gawai pintar (*smartphone*), KPU Kota Batu melakukan diversifikasi saluran komunikasi dengan merambah platform digital seperti Instagram (@kpukotabatu), TikTok, Facebook, dan situs web resmi. Jenis konten edukasi yang diproduksi didesain dalam format visual yang praktis, antara lain video mikro berdurasi 30–60 detik, infografis tata cara mencoblos, panduan cek DPT *online*, serta kampanye penolakan terhadap narasi hoaks dan *money politics*. Pemanfaatan media sosial ini diproyeksikan sebagai instrumen komunikasi publik yang fleksibel untuk menembus sekat-sekat informasi birokrasi pemilu agar lebih mudah diterima oleh pelajar.

Sejalan dengan Teori Modernisasi dari Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1976), perluasan saluran komunikasi di era modernisasi teknologi terbukti mampu memperluas akses informasi politik bagi kelompok pemilih baru. Pemanfaatan kanal digital oleh KPU Kota Batu berhasil memberikan ruang kemudahan bagi siswa untuk mengakses data kepemiluan secara mandiri kapan saja dan di mana saja. Namun demikian, sebagaimana diungkapkan oleh Wiranti (2024) dan Prasetyo (2021), efektivitas media digital sangat bergantung pada kemasan konten; saluran digital yang tidak diimbangi gaya penceritaan yang menarik akan cenderung dilewati oleh remaja yang harian layarnya didominasi oleh algoritma hiburan umum.

**c. Sinergi Kelembagaan antara KPU dan Institusi Pendidikan**

Eksekusi program edukasi pemilih di tingkat lokal tidak berjalan secara terisolasi, melainkan sangat bergantung pada kolaborasi kelembagaan yang harmonis antara KPU Kota Batu dan manajemen SMA Negeri 2 Batu. Pihak sekolah bertindak sebagai fasilitator utama yang menyediakan alokasi waktu kegiatan, meminjamkan sarana gedung aula, serta mengerahkan jajaran guru mata pelajaran PPKn untuk memobilisasi massa siswa kelas XII. Kerja sama ini memotong alur birokrasi perizinan yang kaku dan memberikan ruang penuh bagi KPU untuk menjalankan agenda pendidikan politiknya secara terjadwal tanpa mengganggu kalender akademik sekolah.

Dalam perspektif Administrasi Publik dan sosiologi politik, sinergi ini menunjukkan bahwa sekolah formal di daerah urban berfungsi sebagai laboratorium sosial sekaligus agen sosialisasi politik sekunder yang sangat strategis. KPU Kota Batu bertindak sebagai agen pelembagaan politik formal yang menyediakan substansi materi, sementara pihak sekolah berperan mengondisikan kehadiran fisik sasaran kebijakan. Kendati demikian, kolaborasi ini baru sebatas menjamin kehadiran siswa secara kuantitatif di dalam ruangan, sehingga KPU tetap dituntut untuk terus mengasah kreativitas penyampaian materi agar mampu mengubah kehadiran formal siswa menjadi ketertarikan politik yang substantif.

**2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat**

**a. Faktor Pendukung**

i. Dukungan totalitas sekolah dengan terbukanya akses dan penyediaan fasilitas oleh SMA Negeri 2 Batu sebagai bagian dari penguatan profil pelajar Pancasila dan pendidikan karakter.

ii. Hampir 100% siswa memiliki gawai pintar (*smartphone*), mempermudah penyebaran tautan informasi, cek DPT, dan materi visual kepemiluan tanpa keterbatasan cetak logistik fisik.

iii. Ketersediaan data basis siswa berusia $\ge$ 17 tahun yang terkoordinasi antara KPU, sekolah, dan Dispendukcapil.

**b. Faktor Penghambat**

i. Sikap apatis dan skeptisisme politik mayoritas siswa memandang pemilu sebagai urusan elit politik yang tidak berdampak langsung pada kehidupan mereka.

ii. Rendahnya atensi dan pembagian fokus siswa saat sosialisasi tatap muka berlangsung di aula, konsentrasi siswa terdistraksi oleh aktivitas pribadi seperti bermain *game online*, obrolan antar teman, dan bermain media sosial di balik gawai.

iii. Kalah saing algoritma digital seprti konten edukasi resmi KPU yang cenderung formal dan kaku kalah bersaing dengan algoritma konten hiburan umum di media sosial, sehingga interaksi digital siswa (*engagement rate*) tergolong rendah (34%).

iv. Maraknya persepsi negatif terkait politik uang serta derasnya hoaks di media sosial mendegradasi kepercayaan siswa terhadap integritas pemilu.

**3. Evaluasi Efektivitas Upaya KPU Kota Batu di SMA Negeri 2 Batu**

Efektivitas strategi KPU Kota Batu dievaluasi menggunakan tiga dimensi orientasi perilaku politik menurut Gabriel Almond: kognitif, afektif, dan konatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akumulasi efektivitas upaya KPU berada pada **kategori Sedang (Cukup Efektif)**.

**Tabel 1.** Matriks Evaluasi Efektivitas Perilaku Politik Pemilih Pemula di SMAN 2 Batu

| Dimensi Perilaku | Indikator Evaluasi | Realita / Temuan Empiris | Parameter Efektivitas |
|---|---|---|---|
| Kognitif (Pengetahuan) | Pemahaman syarat pemilih, tanggal pemilu, tata cara mencoblos yang sah, dan warna surat suara. | Strategi Goes to School dan simulasi fisik sukses besar. 92% siswa (322 dari 350 sampel) sangat memahami teknis dan prosedur pemungutan suara. | Tinggi (Efektif) |
| Afektif (Sikap & Minat) | Keterikatan emosional, ketertarikan pada isu politik, interaksi media sosial KPU, serta penolakan money politics. | Terjadi political gap. Siswa cenderung skeptis. Interaksi digital pada akun KPU hanya sebesar 34% karena gaya konten dinilai kaku dan birokratis. | Rendah (Kurang Efektif) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Konatif (Tindakan/Perilaku) | Kehadiran fisik di TPS dan motivasi mandiri untuk menyalurkan hak suara secara sukarela. | Kehadiran di TPS mencapai 71%. Namun, motif kedatangan mayoritas (182 siswa) digerakkan oleh dorongan/mobilisasi orang tua di rumah, bukan kesadaran politik murni. | Sedang (Cukup Efektif) |

*(Sumber: Data Primer Diolah oleh Peneliti, 2026)*

Keberhasilan KPU Kota Batu pada dimensi kognitif (92%) mengonfirmasi Teori Kelembagaan Formal (*March & Olsen, 1984*), di mana institusi resmi penyelenggara memiliki kapasitas struktural untuk mentransfer aturan main (*rules of the game*) dan norma regulatif ke dalam lingkungan pendidikan formal. Sekolah terbukti berfungsi optimal sebagai agen sosialisasi politik sekunder. Namun, anomali timbul ketika dihadapkan pada dimensi afektif dan konatif. Berdasarkan Teori Modernisasi dan Saluran Partisipasi (*Huntington & Nelson, 1976*), kemajuan teknologi digital dan keterbukaan informasi yang tidak diimbangi pelembagaan nilai secara mendalam justru melahirkan *political gap* (kesenjangan perilaku politik). Penetrasi gawai pintar yang tinggi memaparkan Gen-Z pada disinformasi, *gimmick* politik, dan isu *money politics*, yang memperkuat alienasi politik mereka.

Akibatnya, terjadi disonansi antara pengetahuan dan motivasi. Siswa mengetahui secara mendalam *bagaimana* cara mencoblos (kognitif), tetapi tidak memiliki keterikatan emosional (afektif) untuk menggunakan hak pilih tersebut secara sukarela. Kehadiran fisik mereka di TPS (71%) lebih dominan disebabkan oleh faktor penguat eksternal (*external drives*) seperti ikatan sosialisasi keluarga (*family political socialization*), ketimbang dorongan efikasi politik mandiri.

Oleh karena itu, temuan ini menggarisbawahi pentingnya reorientasi strategi sosialisasi pemilu bagi birokrasi KPU di daerah. Model sosialisasi satu arah (*top-down*) yang bersifat informatif-birokratis perlu ditransformasikan menjadi pendekatan interaktif berbasis pengalaman (*experiential learning*). Upaya pendampingan harus digeser dari sekadar transfer pengetahuan prosedural menuju pembentukan kesadaran kritis melalui forum diskusi

kelompok, permainan kuis simulasi digital, serta pemanfaatan Pemilihan Ketua OSIS (Pemilosis) sebagai laboratorium pemilu yang nyata di sekolah.

**Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Umum Presiden 2024 dilaksanakan melalui strategi gabungan (hybrid approach). Strategi ini mengombinasikan sosialisasi tatap muka Goes to School, simulasi fisik pemungutan suara, dan diseminasi konten edukasi digital di platform Instagram dan TikTok. Faktor pendukung utama meliputi komitmen kerja sama yang harmonis dari pihak SMA Negeri 2 Batu serta tingginya kepemilikan gawai pintar (smartphone) oleh siswa. Sebaliknya, faktor penghambat paling dominan berasal dari hambatan sosiopsikologis, yaitu tingginya sikap apatis, maraknya isu money politics, serta pembagian fokus siswa yang cenderung bermain game online dan mengobrol saat sosialisasi berlangsung.

Evaluasi efektivitas upaya KPU Kota Batu berada pada kategori sedang (cukup efektif). Terjadi fenomena political gap (kesenjangan perilaku politik) yang nyata; strategi KPU sukses besar pada dimensi kognitif dengan meningkatkan pemahaman teknis prosedural mencoblos siswa hingga 92%. Namun, strategi tersebut belum optimal menyentuh dimensi afektif dan konatif. Interaksi digital siswa pada akun resmi KPU tergolong rendah (34%), dan kehadiran fisik di TPS (71%) lebih banyak digerakkan oleh mobilisasi eksternal orang tua ketimbang kesadaran politik mandiri. Implikasi dari studi ini menekankan pentingnya reformasi model sosialisasi pemilu daerah, dari pendekatan kaku birokratis satu arah menjadi pendekatan interaktif berbasis pengalaman (experiential learning) dan diskusi kritis untuk mentransformasi pengetahuan teknis menjadi kesadaran memilih yang sukarela.

**Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu disarankan untuk mereformasi pola sosialisasi konvensional berbasis ceramah birokratis satu arah menjadi pendekatan interaktif berbasis pengalaman (experiential learning). KPU perlu mengintegrasikan ruang diskusi kelompok kritis (Focus Group Discussion), kompetisi kuis digital, serta membentuk kader "Duta Demokrasi" di lingkungan sekolah. Selain itu, gaya komunikasi pada media sosial resmi KPU di platform Instagram dan TikTok perlu dirombak dari format yang kaku menjadi konten visual penceritaan (storytelling), komedi mikro, dan live streaming interaktif yang selaras dengan psikologi harian Generasi Z.

Di sisi lain, pihak SMA Negeri 2 Batu diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi sekolah sebagai laboratorium demokrasi yang nyata melalui pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS (Pemilosis) yang mengadopsi standar dan logistik resmi KPU. Peningkatan literasi politik siswa juga dapat diperkuat melalui mata pelajaran PPKn yang berorientasi pada proyek pembelajaran interaktif, seperti pembuatan konten edukasi anti-hoaks dan penolakan terhadap praktik politik uang (money politics).

Terakhir, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel dengan menerapkan metode penelitian campuran (mixed-methods). Penelitian mendatang diharapkan dapat menguji secara kuantitatif pengaruh komparatif antara efektivitas sosialisasi digital KPU dan peran sosialisasi politik keluarga (family political socialization) terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula, baik di wilayah urban maupun rural.

**Referensi**

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.

Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar ilmu politik* (Ed. Revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.

Campbell, A., Converse, P. E., Miller, W. E., & Stokes, D. E. (1960). *The American voter*. John Wiley & Sons.

Gaffar, M. A. (2021). Sikap apatisme dan alienasi politik pemilih pemula dalam momentum pemilu presiden. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 112-125.

Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Harvard University Press.

March, J. G., & Olsen, J. P. (1984). The new institutionalism: Organizational factors in political life. *American Political Science Review*, 78(3), 734-749.

Prasetyo. (2021). Media sosial dan edukasi pemilih pemula. *Jurnal Komunikasi*, 5(2), 88-99.

Putri, R. (2022). Efektivitas pendidikan pemilih KPU. *Jurnal Demokrasi*, 7(1), 34-45.

Sukmono. (2015). Sosialisasi politik dan partisipasi pemilih pemula. *Jurnal Ilmu Sosial*, 4(1), 45-56.

Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. PT Grasindo.

Verba, S., Nie, N. H., & Kim, J. O. (1978). *Participation and political equality: A seven-nation comparison*. Cambridge University Press.

Verba, S., Nie, N. H., & Kim, J. O. (1978). *Participation and political equality: A seven-nation comparison*. Cambridge University Press.

Wibowo. (2021). Karakteristik dan dinamika pemilih pemula. *Jurnal Politik Lokal*, 3(1), 12-25.

Wiranti, D. I. (2024). Pengaruh penggunaan media Instagram @KPU_KUANSING terhadap partisipasi politik pemilih pada pemilih pemula. *Jurnal Komunikasi Politik dan Media*, 7(1), 67-81.